



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN SUMARAJAYA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 715186

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **842.913.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 110.286.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 105.358.000
3. Tanah Seluas 237 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 127.269.000
4. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA BANGLI, Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **202.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, SCOPY BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	412.443.868
F. HARTA LAINNYA	Rp.	75.000.000
Sub Total	Rp.	1.532.856.868
III. HUTANG	Rp.	638.488.134
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	894.368.734

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.